



RENCANA KERJA [RENJA] 2026

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2026	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III	23
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.2 Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	27
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berlaku lima tahunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari:

Renja PD memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) dengan perencanaan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, keberadaan Renja Perangkat Daerah sangat penting dalam menjamin keterpaduan antara arah pembangunan daerah dengan pelaksanaan kegiatan pada tingkat perangkat daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renja PD dapat dilakukan perubahan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1), perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila:

- a. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
- b. Pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta program dan kegiatan dalam RKPD; dan/atau
- c. Terdapat keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan.

Lebih lanjut, pada Pasal 360 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan *rancangan perubahan* Renja PD dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunannya. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa penyusunan rancangan perubahan Renja PD berpedoman pada:

- Rancangan Perubahan RKPD; dan
- Hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/78/IV/P2EPD/Bappeda-2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 17) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 18) Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/78/IV/P2EPD/Bappeda-2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Menyediakan acuan bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025;
4. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Sumatera Barat Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Biro PBJ, proses penyusunan Renja Biro PBJ, keterkaitan antara Renja Biro dengan Dokumen RKPD dan Renstra Biro PBJ

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Biro PBJ serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan penganggaran Biro PBJ Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Biro PBJ

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Biro PBJ, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 SD triwulan II tahun berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3. 2 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, serta Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi penting dalam upaya peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, baik yang belum memenuhi target, telah mencapai target, maupun yang melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Melalui evaluasi pelaksanaan, dapat diperoleh informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan, antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya, atau melebihinya target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi terhadap capaian target program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah;
3. Tindakan korektif berupa kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, selain untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau ketidaktercapaian target, hasil evaluasi ini juga dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.1.1 bagian dari rekapitulasi kegiatan dan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2021-2026, sebagai berikut: (tabel 2.1)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renja OPD s.d Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan	%		936.888.566		376.330.212		40%
4	1	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	%		1.020.000		1.008.000		99%
4	1	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1.020.000	3	1.008.000	50%	99%
4	1	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	100	102.960.000		-		0%
4	1	1	1	2	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	102.960.000	0	-	0%	0%
4	1	1	1	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	100	16.500.000		15.580.000		94%
4	1	1	1	3	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	16.500.000	1	15.580.000	100%	94%
4	1	1	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	10.000.000		-		
4	1	1	1	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	10.000.000	0	-	0%	0%
4	1	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	100	548.440.432		238.436.145		43%
4	1	1	1	6	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.411.500	0	-	0%	0%
4	1	1	1	6	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	29.771.200	3	25.852.034	75%	87%
4	1	1	1	6	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.263.000	1	-	50%	0%
4	1	1	1	6	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	507.994.732	6	212.584.111	50%	42%
4	1	1	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	200.008.134		102.319.067		51%
4	1	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	370.000	0	-	0%	37.76
4	1	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	199.638.134	6	102.319.067	50%	51%

4	1	1	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%	100	57.960.000		18.987.000		33%
4	1	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	45.895.000	3	14.337.000	60%	31%
4	1	1	1	9	2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	1	250.000	0	-	0%	0%
4	1	1	1	9	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	18	11.815.000	9	4.650.000	50%	39%
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	%	1	292.150.000		37.366.500		13%
4	1	1	1	13		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase optimalisasi materi, komun ikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	%	1	37.240.000		25.450.000		68%
4	1	1	1	13	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan	1	31.140.000	0	21.180.000	0%	68%
4	1	1	1	13	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	laporan	1	3.660.000	0	1.830.000	0%	50%
4	1	1	1	13	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan	12	2.440.000	6	2.440.000	50%	100%
4	1	1	1	14		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%	100	216.660.000		-		
4	1	1	1	14	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	laporan	1	214.220.000	0	-	0%	0%
4	1	1	1	14	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan	1	1.220.000	0	-	0%	0%
4	1	1	1	14	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan	1	1.220.000	0	-	0%	51.12
4	1	1	1	14		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	38.250.000		11.916.500		31%
4	1	1	1	14	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	39	15.870.000	39	2.940.000	100%	19%
4	1	1	1	14	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	10.210.000	0	-	0%	0%
4	1	1	1	14	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	12.170.000	2	8.976.500	100%	74%

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi serapan anggaran baru mencapai 33,7% dan realisasi kinerja 47,51%. Hal ini disebabkan dengan analisis terhadap 2 program dan 10 kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran Rp.1.020.000 dengan realisasi Rp.1.008.000 (99,99%) realisasi lebih dari 90% karena memang disesuaikan dengan kalender perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran Rp.102.960.000 dengan realisasi Rp.0 (0%) kegiatan ini belum direalisasikan karena belum tersedia aliran kas pada semester I.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah anggaran Rp.16.500.000 dengan realisasi Rp.15.580.000 (94%) tingginya realisasi kegiatan ini karena asuransi BMD dilaksanakan dibulan April 2025 dan untuk satu tahun anggaran.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran Rp.10.000.000 dengan realisasi Rp.0 (0%) kegiatan ini belum mencapai target sebagaimana direncanakan semula, karena dilakukan penyesuaian dengan kalender kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran Rp.548.440.432 dengan realisasi Rp.238.436.145 (43%) realisasi kegiatan ini belum optimal disebabkan oleh beberapa proses pengadaan seperti belanja modal, belanja cetak penggandaan yang masih dalam tahap persiapan pelaksanaan untuk merealisasikan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran Rp.200.008.134 dengan realisasi Rp.102.319.067 (51%) kegiatan ini mencapai 51% karena disesuaikan dengan kalender aliran kas untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

7. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran Rp.57.960.000 dengan realisasi Rp.18.987.000 (33%) kegiatan ini baru tercapai 33% karena sesuai dengan kalender kegiatan pemeliharaan BMD.

B. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.37.240.000 dengan realisasi Rp.24.450.000 (68%) realisasi mencapai 68% sesuai dengan kalender kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik anggaran Rp.216.660.000 dengan realisasi Rp.0 (0%) kegiatan ini belum terealisasi karena terkendala dalam proses pembayaran. Kegiatan ini berupa belanja sewa server yang dibayar melalui LS.
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran Rp.38.250.000 dengan realisasi Rp.11.916.500 (31%) pencapaian realisasi sebesar 31% sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil dari efektivitas kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, telah diketahui adanya beberapa target kinerja program dan kegiatan yang belum mencapai realisasi sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah korektif baik dalam aspek perencanaan maupun penganggaran.

Tindakan perencanaan yang diambil adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 360 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara itu, tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan perubahan atas rencana kerja dan pendanaan dalam dokumen Perubahan Renja Tahun 2025,

yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap kondisi tersebut, Kebijakan dan tindakan strategis yang diambil mencakup:

1. Analisis mendalam penyebab tidak tercapainya target:

- Kebijakan perencanaan: melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan awal; mengidentifikasi apakah target sesuai dengan kebutuhan.
- Kebijakan penganggaran: menganalisis apakah alokasi anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan program; menganalisis apakah terdapat kendala dalam pencairan anggaran; menganalisis apakah ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- Kebijakan tindakan: melakukan evaluasi kinerja secara berkala.

2. Revisi perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan:

- Kebijakan perencanaan: menyusun kembali rencana aksi terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kebijakan penganggaran: mengidentifikasi pos-pos anggaran yang kurang efektif untuk direalokasikan ke kegiatan prioritas.
- Kebijakan tindakan: melakukan perubahan Renja dan perubahan anggaran.

Secara umum, seluruh anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan guna mencapai 3 (tiga) sasaran yang disepakati dalam dokumen penetapan kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD 2021-2026.

1. Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra Biro PBJ Setda Prov Sumbar. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Biro PBJ Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan kinerja pelayanan diatur dalam regulasi dari instansi pembina sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala LKPP No 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup:

1. Pemanfaatan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP (%)
2. Proses e-tendering/e-seleksi dalam PBJ dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)
3. Pelaksanaan Katalog Elektronik dan toko daring dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)

4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)
5. Penerapan E-Kontrak pada aplikasi SPSE dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)
6. Ketersediaan komoditi UMKM pada e-katalog Lokal
7. Ketersediaan kategori produk UMKM pada e-marketplace
8. Pemenuhan kebutuhan JF PPBJ dari formasi JF PPBJ (%)
9. Tingkat kematangan UKPBJ (Level)

Selanjutnya dapat kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja layanan SKPD dengan format tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat s/d Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SPM / STANDAR	IKK	TARGET RENSTRA BIRO					REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CAT ANALISA
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pemanfaatan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP (%)			90	91	92	93	94	-	77,12	78,85	81,09	85	100	
2	Proses e-tendering/e-seleksi dalam PBJ dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)			80	82	84	86	88	-	86	86	86	86	100	
3	Pelaksanaan Katalog Elektronik dan toko daring dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)			80	82	84	86	88	-	78,50	78,85	83,85	86	95	
4	Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)			40	60	80	100	100	-	78,50	78,85	83,85	90	95	
5	Penerapan E-Kontrak pada aplikasi SPSE dibandingkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP (%)			40	60	80	100	100	-	78,50	78,85	83,85	85	95	
6	Ketersediaan komoditi UMKM pada e-katalog Lokal			5	6	7	8	10	-	4	5	5	6	7	
7	Ketersediaan kategori produk UMKM pada e-marketplace			1	1	2	2	3	-	-	-	-	-		
8	Pemenuhan kebutuhan JF PPBJ dari formasi JF PPBJ (%)			50	60	70	80	85	-	60	65	70,83	75	79	
9	Tingkat kematangan UKPBJ (Level)			3	3	3	4	4	-	3	3	3	3	3	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, tentunya ada tantangan dan peluang yang kemungkinan akan dihadapi untuk lima tahun mendatang, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi.

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat digambarkan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel 2.3.1 di bawah ini.

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa belum berjalan secara optimal	Belum optimalnya pemahaman SDM dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Masih terdapatnya perbedaan pemahaman pelaku pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah.
		Pelaku pengadaan di luar UKPBJ (PA/KPA/ PPK) belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan

		Rencana pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan belum terlaksana sesuai kebutuhan
		Belum adanya pelayanan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa, sehingga menyebabkan keengganan untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah
	Belum optimalnya tatakelola terkait pengadaan barang dan jasa	Sering terjadinya perubahan aturan terkait pengadaan barang/jasa
		Belum optimalnya implementasi dalam mewujudkan tingkat kematangan UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa proaktif.
		Belum maksimalnya pelaksanaan e-purchasing secara ideal
	Belum optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kualitas penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa masih kurang optimal karena masih perlu pengembangan sistem informasi yang komprehensif oleh LKPP

Perumusan isu-isu strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; (2) gambaran pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra LKPP Republik Indonesia; (4) hasil telaah RTRW dan KLHS.

Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan pembangunan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu: (a) Belum optimalnya pemahaman SDM dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; (b) Belum optimalnya tatakelola terkait pengadaan barang dan jasa; dan (c) Belum optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

2. Gambaran pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Target kinerja di dalam Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya telah tercapai. Kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk dengan adanya sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan perencanaan, pelaksanaan pengadaan, monitoring dan pengendalian serta penilaian kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang semakin berkualitas kemudian didukung dengan SDM yang berkompeten walaupun dari sisi kuantitas masih belum memadai.

3. Hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra LKPP Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sejalan dan mendukung pencapaian visi, misi LKPP Republik Indonesia.

4. Hasil telaah RTRW

RTRW dan KLHS menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa, namun dari sisi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sendiri tidak secara langsung bersentuhan.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang pengadaan barang dan jasa serta dengan memperhatikan berbagai dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Tingkat Kematangan UKPBJ

Tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri atas 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel dan target selanjutnya menuju tingkat kematangan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa proaktif.

2. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ

Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola Fungsi PBJ dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu **pertama** dari persentase keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa terhadap formasi yang sudah dihitung. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dari KemenPAN-RB atau rekomendasi kebutuhan

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP. Hasil perhitungan formasi merupakan kondisi ideal jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dibandingkan dengan jumlah pengadaan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kedua berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia mempertegas dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan bahwa Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai PPK dan PPTK yang melaksanakan tugas sebagai PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa, dalam hal PPK dan/atau PPTK belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa level-1. Kedua hal tersebut di atas menjadi isu strategis yang harus menjadi poin penting pada pelayanan kinerja perangkat daerah ke depan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Aplikasi SiRUP memberikan ruang bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan yang disusun pada tahun berjalan untuk pengadaan barang/jasa di tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dilakukan setelah penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan

b. *E-Tendering/E-Seleksi*

Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Di dalam ruang lingkup SPSE terdapat proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. *E-Tendering/ E-Seleksi* adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP.

c. *E-Purchasing* melalui Katalog atau Toko Daring

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau toko daring. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*,

Ruang lingkup Non E-Tendering dan Non E-Purchasing adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung, Pengadaan Langsung dan Swakelola memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan.

e. E-Kontrak

E-Kontrak adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP,

f. Sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa hingga Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Renja disusun melalui penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran kegiatan, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan, yang didasarkan pada evaluasi capaian kinerja serta perkembangan aktual pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan dokumen Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021–2026.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan subkegiatan tercantum dalam Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah provinsi sumatera barat.
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran dari tujuan yang akan dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa:

1. Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi.

Berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
TARGET TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa minimal baik	70
		1.1 Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa minimal baik	70
2	Meningkatnya organisasi tang akuntabel dan melayani	2.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70
		2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80

3.2 Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, serta penjabaran dari Misi ke-7 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”, pada Tujuan “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, Sasaran Ketiga “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan Indikator Kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan”.

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan Tahun 2025

No.	RANCANGAN RANCANGAN RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (PENETAPAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025)					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.682.744.412	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.078.681.801	
1 (4.01.01)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sumbar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.290.399.412	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sumbar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.647.102.301	
4.01.01.1 .01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	1.020.000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	1.326.000	
4.01.01.1 .01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang di susun	6 Dokumen	1.020.000	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang di susun	3 Dokumen	1.326.000	
4.01.01.1 .02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	0%	0	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	0%	0	
4.01.01.1 .02.03	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0%	0	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0%		
4.01.01.1 .03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	16.500.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	16.500.000	
4.01.01.1 .03.02	a Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	3 unit	16.500.000	a Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	3 unit	16.500.000	
4.01.01.1 .05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10.000.000	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000	
4.01.01.1 .05.09	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	4 orang	10.000.000	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	8 Orang	20.000.000	
4.01.01.1 .06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	812.277.878	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	893.505.666	
4.01.01.1 .06.02	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	11.860.600	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	13.046.660	
4.01.01.1 .06.03	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah paket pengadaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 unit	35.791.500	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah paket pengadaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 unit	39.370.650	
4.01.01.1 .06.04	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	104.565.900	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	115.022.490	
4.01.01.1 .06.05	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	25.054.200	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	27.559.620	
4.01.01.1 .06.09	e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	635.005.678	e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	698.506.246	
4.01.01.1 .07	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	142.473.400	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	156.720.740	
4.01.01.1 .07.05	a Pengadaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket mebel yang disediakan	6 unit	1.000.000	a Pengadaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket mebel yang disediakan	6 unit	1.100.000	
4.01.01.1 .07.06	b Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Provinsi Sumbar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	141.473.400	b Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	155.620.740	
4.01.01.1 .08	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200.008.134	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	220.008.947	
4.01.01.1 .08.01	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah Surat Menyurat yang diproses dalam 1 tahun	1 Laporan	370.000	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah Surat Menyurat yang diproses dalam 1 tahun	1 Laporan	407.000	
4.01.01.1 .08.04	b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Honorarium Non ASN pelayanan umum kantor yang tersedia	4 orang	199.638.134	b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Honorarium Non ASN pelayanan umum kantor yang tersedia	4 orang	219.601.947	

4.01.01.1.09	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	108.120.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	119.032.000
4.01.01.1.09.02	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional dan lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	83.490.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional dan lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	91.839.000
4.01.01.1.09.05	b	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah unit Mebel yang dipelihara (meja dan kursi kerja)	2 unit	1.000.000	b	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah unit Mebel yang dipelihara (meja dan kursi kerja)	2 unit	1.200.000
4.01.01.1.09.06	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Komputer, PC, laptop, Scanner dan Printer)	35 unit	23.630.000	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Komputer, PC, laptop, Scanner dan Printer)	35 unit	25.993.000
2. (4.01.07)		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Provinsi Sumbar	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	90%	392.345.000		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG	Provinsi Sumbar	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	90%	431.579.500
4.01.07.1.01	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Persentase Pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui aturan	100%	45.025.000	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Persentase Pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui aturan	100%	49.527.500
4.01.07.1.01.01	a	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Tersedianya kebijakan daerah terkait strategi PBJ dan tersedianya dokumen riset dan analisis pasar	3 Laporan	38.925.000	a	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Tersedianya kebijakan daerah terkait strategi PBJ dan tersedianya dokumen riset dan analisis pasar	3 Laporan	42.817.500
4.01.07.1.01.02	b	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Terlaksananya pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan sesuai aturan, diumumkan RUP pada aplikasi SIRUP dan terselenggaranya penilaian kinerja penyedia yang telah dilaksanakan oleh KPA/PPK	3 Laporan	3.660.000	b	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Terlaksananya pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan sesuai aturan, diumumkan RUP pada aplikasi SIRUP dan terselenggaranya penilaian kinerja penyedia yang telah dilaksanakan oleh KPA/PPK	3 Laporan	4.026.000
4.01.07.1.01.03	c	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	2.440.000	c	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	2.684.000
4.01.07.1.02	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Sumbar	Persentase pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui sistem pengadaan	85%	216.660.000	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Sumbar	Persentase pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui sistem pengadaan	85%	238.326.000
4.01.07.1.02.01	a	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Provinsi Sumbar	Laporan fasilitasi pemanfaatan aplikasi SPSE, Pembinaan Standarisasi SPSE, Pemeliharaan server dan jaringan aplikasi SPSE, tersedianya colocation server dan jaringan aplikasi SPSE	12 Laporan	214.220.000	a	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Provinsi Sumbar	Laporan fasilitasi pemanfaatan aplikasi SPSE, Pembinaan Standarisasi SPSE, Pemeliharaan server dan jaringan aplikasi SPSE, tersedianya colocation server dan jaringan aplikasi SPSE	12 Laporan	235.642.000
4.01.07.1.02.02	b	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa beserta aplikasi penunjang	12 Laporan	1.220.000	b	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa beserta aplikasi penunjang	12 Laporan	1.342.000
4.01.07.1.02.03	c	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Laporan IKM terhadap pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.220.000	c	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Laporan IKM terhadap pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.342.000
4.01.07.1.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3	130.660.000	3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Sumbar	Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3	143.726.000
4.01.07.1.03.01	a	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Jumlah Bimtek PBJ, Pelaksanaan Sidang Kode Etik, Pelatihan Kantor Sendiri, Pengiriman Personil UKPBJ, dan Sertifikasi Kompetensi KPA/PPK yang dilaksanakan	56 orang	98.950.000	a	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Jumlah Bimtek PBJ, Pelaksanaan Sidang Kode Etik, Pelatihan Kantor Sendiri, Pengiriman Personil UKPBJ, dan Sertifikasi Kompetensi KPA/PPK yang dilaksanakan	56 orang	108.845.000
4.01.07.1.03.02	b	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Pembinaan Tingkat Kematangan UKPBJ, Rapat Koordinasi Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	21.340.000	b	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Pembinaan Tingkat Kematangan UKPBJ, Rapat Koordinasi Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	23.474.000
4.01.07.1.03.03	c	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Pendampingan terkait PBJ, Pendampingan Paket Strategis, Penyediaan Klinik Pengadaan, Penyelesaian Sangketa Kontrak dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan jasa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	10.370.000	c	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Sumbar	Pendampingan terkait PBJ, Pendampingan Paket Strategis, Penyediaan Klinik Pengadaan, Penyelesaian Sangketa Kontrak dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan jasa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	11.407.000

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kebutuhan pembangunan, ketersediaan anggaran, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih adaptif, efektif, dan akuntabel untuk mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Diharapkan melalui dokumen Renja Perubahan ini, kinerja perangkat daerah dapat lebih terarah dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Selanjutnya, seluruh jajaran di lingkungan perangkat daerah diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan, sasaran, serta indikator yang telah ditetapkan.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagian-bagian dan seluruh staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya serta menjaga konsistensi dengan RKPD Perubahan Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan.
2. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025, yang kemudian disampaikan ke BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat untuk diverifikasi.

Padang, 7 Juli 2025
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



CERRY M, ST, MM
Pembina

NIP. 19761016 200812 1 001